



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MELKIANUS
2. Jabatan : ANGGOTA DPRD
3. NHK : 528245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.223.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/432 m2 di KAB / KOTA SINTANG, WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 5756 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 118.750.000
3. Tanah Seluas 16340 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 11310 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 16090 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 2893 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
7. Tanah Seluas 1935 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 19270 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 16030 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
10. Tanah Seluas 17840 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
11. Tanah Seluas 15290 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 14.000.000

1. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.267.750.000

III. HUTANG

Rp. 380.593.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.887.157.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.